

SEKITAR REUNIFIKASI KOREA

Clara JOEWONO

Sejarah terbaginya Korea

Kemenangan pihak Sekutu dalam Perang Dunia II kiranya ikut menentukan nasib sebuah negara jazirah di Asia Timur Laut yaitu Korea. Sejak tahun 1910 hingga kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II Korea berada di bawah penjajahan Jepang. Dalam rangka pelaksanaan perlucutan senjata dan repatriasi tentera dan pegawai sipil Jepang ke negerinya, pimpinan tentera Amerika Serikat dan pemimpin-pemimpin Uni Sovyet sepakat untuk membagi Korea menjadi dua bagian melalui Garis Lintang 38 derajat yang dimaksudkan sebagai garis demarkasi bagi kedua pasukan pendudukan itu. Daerah di sebelah Selatan garis demarkasi dikuasai oleh Amerika Serikat sedangkan sebelah Utaranya dikuasai oleh Uni Sovyet.

Perang Dingin yang kemudian berkecamuk telah ikut menentukan nasib Korea di kemudian hari. Makin memburuknya hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet membawa pengaruh terhadap pemisahan wilayah Korea yang kian hari kian bertambah sukar untuk dijembatani. Ketika itu sudah timbul berbagai inisiatif untuk penyatuan kembali, tetapi belum pernah berhasil. Setelah ternyata bahwa usaha-usaha untuk merundingkan penyatuan Korea mengalami kegagalan dengan Uni Sovyet, Amerika Serikat membawa masalah Korea ini dalam Sidang Umum ke dua PBB pada tahun 1947. Sidang Umum berhasil membentuk Komisi Sementara untuk Korea (UNTCOK) yang bertugas menyelenggarakan sebuah pemilihan umum di seluruh jazirah Korea untuk membentuk sebuah pemerintah kesatuan Korea. Tetapi Korea Utara yang berhaluan komunis menolak pengakuan atas Komisi tersebut. Setelah berbagai usaha untuk membujuk Korea Utara mengambil bagian dalam pemilihan umum yang bersifat nasional itu gagal, akhirnya pemilihan umum hanya diadakan di wilayah Selatan pada 10 Mei 1948. Kemudian secara resmi diproklamkan Republik Korea pada tanggal 15 Agustus 1948. Perpecahan yang lebih dalam tidak terhindarkan lagi ketika Korea Utarapun memproklamkan pemerintahan Republik Demokrasi Rakyat Korea pada bulan September tahun itu juga. Tetapi Sidang Umum PBB hanya mengakui Republik Korea sebagai satu-satunya pemerintah yang sah di Korea.

Perbedaan antara ke dua wilayah itu menjadi makin nyata dan tajam setelah keduanya sebagai pemerintah yang otonom atas wilayahnya masing-masing bertumpu atas ideologi yang bertolak belakang: komunis dan non-komunis. Dalam perjalanan sejarah ideologi yang berbeda ini makin mempertajam perpecahan dalam bangsa yang semula satu ini. Satu faktor penting yang patut dicatat dalam kasus perpecahan wilayah di Korea ini, bahwa orang Korea tidak pernah merasa terpecah sebagai bangsa. Nasionalisme dan kebanggaan sebagai bangsa Korea tertanam sama kuatnya di kedua wilayah yang terbagi itu. Perasaan kesatuan yang sangat kuat ini merupakan motivasi pada masing-masing pihak untuk mengadakan usaha-usaha ke arah penyatuan kembali dan kesatuan nasional. Baik Utara maupun Selatan berusaha untuk menyatukan wilayah dan bangsanya sesuai dengan dan yang menguntungkan ideologi yang dianutnya. Dengan perkataan lain Utara selalu berusaha untuk mengkomuniskan Selatan sedangkan Selatan berusaha menghalau pengaruh komunis. Dari sejak terbentuknya kedua pemerintahan itu, masalah utama yang selalu dihadapi oleh masing-masing wilayah ialah bagaimana dapat memenangkan aspirasi ideologisnya terhadap seluruh Korea.

Puncak pertentangan antara Utara dan Selatan ialah agresi militer oleh Korea Utara pada tanggal 25 Juni 1950 yang berkepanjangan menjadi suatu perang saudara selama tiga tahun. Dalam perang ini masing-masing pihak tidak berdiri sendiri, tetapi mendapatkan bantuan dan dukungan dari negara-negara besar yang secara bipolaristis bertentangan yaitu Uni Sovyet dan RRC di satu pihak dan Amerika Serikat di pihak lain. Perang ini merupakan manifestasi perpecahan yang makin parah antara Korea Utara dan Selatan yang walaupun tidak menutup kemungkinan paling tidak mengaburkan prospek untuk penyatuan kedua bagian Korea.

Ketika perang itu berakhir pada tahun 1953, garis lintang 38 derajat merupakan daerah bebas militer (DMZ) yang diletakkan di bawah pengawasan tentera PBB. Berakhirnya perang tidak berarti berakhirnya berbagai kegiatan yang bermusuhan antara Utara dan Selatan, dari kontak senjata secara langsung hingga kegiatan-kegiatan subversif dan sabotase lainnya. Terutama pihak Utara tidak pernah melewatkan setiap peluang untuk melakukan kegiatan yang disebutnya sebagai "membebaskan rakyat Selatan yang tertindas dari imperialis Amerika dan antek-anteknya".

Sementara itu kedua wilayah juga berusaha membangun bagiannya masing-masing dengan bantuan negara-negara besar pendukungnya. Tekanan pembangunan adalah pembangunan sosial ekonomi di

samping pembangunan angkatan bersenjatanya. Setiap kemajuan dalam kekuatan militer masing-masing wilayah merupakan bertambahnya ancaman terhadap pihak yang lain, karena itu keterancaman dan ketegangan tidak pernah berkeputusan melanda jazirah Korea.

Gagasan ke arah unifikasi dan langkah-langkah yang ditempuh

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian terdahulu, hasrat untuk penyatuan Korea tidak pernah padam pada kedua pihak dan masing-masing berusaha dengan caranya sendiri mencapai penyatuan ini. Tetapi hasrat ini masih sangat jauh dari kenyataan, karena permusuhan yang ada menyebabkan usaha di pihak yang satu dianggap merupakan bahaya bagi pihak yang lain. Jika menilik perkembangan demikian, maka pada akhirnya hanya kekuatan senjata yang akan menentukan pihak mana yang akan keluar sebagai pemenang. Karena itu tidak mengherankan jika terjadi semacam perlombaan persenjataan antara Utara dan Selatan yang dimanifestasikan dalam pembangunan angkatan bersenjatanya masing masing. Tetapi pengalaman dalam perang saudara tahun limapuluhan yang banyak menyebabkan kesengsaraan pada rakyat Korea tampaknya agak menahan Utara dan Selatan untuk segera melaksanakan tindakan kekerasan terhadap yang lain. Terutama dari pihak Selatan tampak dari pernyataan-pernyataannya keenggannya untuk kembali melibatkan diri dalam suatu peperangan dengan Utara. Hal ini selain disebabkan oleh keengganan terhadap tindakan kekerasan itu sendiri, kemungkinan besar juga karena Selatan sedang dalam taraf memodernisir angkatan bersenjatanya yang diharapkan baru selesai pada tahun 1976. Dalam kaitan ini juga beberapa faktor dalam perkembangan politik internasional ikut menentukan.

Pada pidato kenegaraan memperingati hari nasional Republik Korea pada tanggal 15 Agustus 1970 untuk pertama kalinya Presiden Park Chung-hee menyerukan pengurangan ketegangan antara kedua wilayah Korea dan mengajak memperjuangkan kesejahteraan rakyat Korea tanpa pemaksaan ideologi dan dominasi politik secara kekerasan. Seruan Presiden Park tidak mendapatkan tanggapan sama sekali dari Korea Utara.

Pada tanggal 12 Agustus 1971 Palang Merah Korea Selatan mengusulkan kepada counter-partnya di Utara untuk membuka perundingan dalam rangka mempertemukan kembali keluarga yang terpisah dan tercecer di dua wilayah yang terpisah. Usul ini didasari oleh

dorongan kemanusiaan untuk mengakhiri penderitaan keluarga yang terpisah sebagai akibat pemisahan wilayah Korea. Dalam dialog yang kemudian dapat terlaksana lewat pertemuan delegasi Palang Merah Utara dan Selatan, tampak sekali adanya perbedaan yang sangat besar di kedua belah pihak. Korea Selatan menghendaki agar kontak-kontak yang paling awal semata-mata didasari oleh motivasi kemanusiaan sebagai perintis jalan untuk ke arah penyelesaian masalah yang lebih kompleks seperti politik dan militer. Tetapi sebaliknya Korea Utara berusaha menggunakan kesempatan dialog itu sebagai arena politik dan menghendaki agar masalah-masalah politik dan militer sekaligus dibicarakan.

Sikap Korea Utara tampaknya tidak mengurangi tekad Presiden Park untuk terus mencari kemungkinan meningkatkan dialog dalam usaha menemukan titik-titik pertemuan lebih lanjut. Untuk ini Presiden Park telah melakukan suatu inisiatif yang berani dengan mengirinkan utusan rahasia ke Pyongyang untuk menjajagi kemungkinan dibukanya saluran untuk mengadakan komunikasi langsung. Dari satu ke lain dialog akhirnya melahirkan komunike bersama tanggal 4 Juli 1972 yang merupakan tonggak pertama dalam merealisasikan cita-cita unifikasi.

Menyusuli Komunike Bersama 4 Juli, pada bulan Agustus 1972 diselenggarakan Konferensi Palang Merah Korea Utara dan Selatan, dan pada bulan Nopember tahun yang sama dibentuk secara resmi Komite Koordinasi Utara-Selatan (South-North Coordinating Committee). Dengan terbentuknya Komite ini, saluran untuk mengadakan dialog bagi kedua Korea bertambah. Isi Komunike Bersama 4 Juli pada pokoknya memuat dasar-dasar kesepakatan Korea Utara dan Selatan dalam menuju unifikasi negerinya, yaitu bahwa kedua Korea akan menghentikan sikap permusuhan untuk meredakan ketegangan; penolakan penggunaan cara-cara militer dalam usaha penyatuan itu; masing-masing pihak setuju untuk tidak bertindak secara provokatif terhadap yang lain dan tidak saling menjatuhkan lewat propaganda; menentang setiap usaha asing yang mencampuri penyatuan ini.

Situasi internasional dan pengaruhnya terhadap unifikasi Korea

Sekalipun cita-cita mencapai unifikasi Korea tidak pernah mengendur, tetapi agaknya proses ke arah unifikasi itu tidak akan berjalan secepat yang terjadi dalam jangka waktu tiga tahun

ini sekiranya tidak terdorong oleh beberapa gerak langkah politik di dunia internasional.

Sebagai dorongan pertama adalah Doktrin Nixon yang antara lain menyatakan tentang pengurangan dan kemudian penarikan kehadiran pasukan Amerika Serikat dari wilayah Asia-Pasifik. Korea Selatan sebagai salah satu sekutu Amerika Serikat yang terdekat dan langsung berkepentingan dengan kehadiran pasukan AS di wilayahnya merasa ikut dirugikan jika ketetapan Doktrin tersebut segera dilaksanakan. Untuk ini pernah dicoba oleh Korea Selatan untuk mendapatkan sekedar kelonggaran mengenai waktu penarikan mengingat kepentingan dalam negerinya sendiri yang masih membutuhkan bantuan militer Amerika Serikat dalam mengimbangi kekuatan militer pihak Utara. Selain itu juga Korea Selatan sebagai salah satu benteng anti-komunisme di Asia Timur merasa ditinggalkan oleh negara anutannya justru di saat Korea Utara terus meningkatkan pembangunan militernya. Kekhawatiran Korea Selatan didasarkan atas kemungkinan agresi militer Korea Utara sedangkan kemampuan militer Selatan belum memadai untuk dapat memberikan perlawanan yang kuat. Selain itu juga didasarkan atas kenyataan geografis bahwa Korea Utara lebih dekat pada sekutu-sekutunya (RRC dan Uni Sovyet) daripada Korea Selatan terhadap Amerika Serikat. Dalam kunjungannya ke Washington pada bulan Januari 1973, Menlu Korea Selatan Kim Yong-shik menyatakan bahwa kehadiran pasukan Amerika Serikat di negaranya masih harus dipertahankan sampai selesainya program modernisasi angkatan bersenjata Korea Selatan. Juga penting untuk mempertahankan image bahwa commitment Amerika Serikat terhadap perlawanan komunis di kawasan Asia Timur Laut tetap tidak berubah.

Dari pihak Korea Utara, ambisi untuk menyatukan Korea dengan jalan kekerasan **tampaknya** tidak pernah berkurang. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kegiatan subversif dan sabotase terus dilakukan disamping kegiatan perundingan tetap berlangsung. Seruan Presiden Park yang pertama pada tahun 1970 mengenai unifikasi Korea, tidak mendapatkan tanggapan dari Korea Utara, Baru tahun sesudahnya Korea Utara tampak memberikan response sekalipun belum seperti yang diharapkan oleh Selatan, paling tidak ia sudah bersedia mengirimkan delegasi Palang Merahnya untuk melakukan dialog dengan pihak Selatan. Bahwa kemudian Korea Utara lebih membuka diri terhadap kemungkinan dialog yang lebih luas, hal ini merupakan akibat terjadinya detente antara RRC dan Amerika Serikat, dan antara Uni Sovyet dan Amerika Serikat yang ditandai dengan kunjungan Presiden Nixon ke negara-negara tersebut pada tahun 1972.

Detente ini mempunyai impact langsung terhadap Korea, karena dua raksasa yang saling mendekati merupakan anutan mereka.

Bagi Korea Selatan, tindakan Presiden Nixon sangat mengejutkan, karena kebijaksanaan pendekatannya terhadap bekas-bekas lawannya dilakukan tanpa pemberitahuan atau konsultasi dengan sekutu-sekutunya. Kasus Taiwan lebih memperkuat kekhawatiran Korea Selatan mengenai kemungkinan ditinggalkannya oleh Amerika demi untuk kepentingan negara besar itu sendiri. Kekhawatiran yang sama juga timbul pada Korea Utara atas kebijaksanaan negara-negara anutannya yaitu RRC dan Uni Sovyet. Perjuangannya selama ini dalam menentang Korea Selatan terutama didasari oleh motivasi menentang Amerika Serikat, sedangkan negara-negara anutannya itu justru bersedia mengadakan pendekatan terhadap pemimpin ideologi yang selama ini ditentangnya.

Kekhawatiran yang sama yang timbul di kedua Korea atas sikap RRC, Amerika Serikat dan Uni Sovyet, telah lebih mendorong Korea Utara untuk menanggapi uluran tangan Korea Selatan untuk membuka jalan ke arah tercapainya unifikasi Korea. Faktor pementu yang sama terdapat pada kedua Korea ialah nasionalisme yang sangat kuat. Terpecahnya Korea karena ikut campurnya pihak-pihak luar bagi kedua Korea merupakan tragedi nasional dan melukai kebanggaan mereka sebagai bangsa. Penyatuan kembali wilayah yang terbagi merupakan aspirasi dan motivasi utama kedua belah pihak yang selalu mereka coba untuk mencapainya.

Hambatan-hambatan terhadap realisasi penyatuan Korea

Sebagai perbedaan yang sangat besar ialah perbedaan ideologi dan perkembangan masing-masing yang sudah sangat jauh selama seperempat abad sejak terjadinya pemisahan Korea. Peperangan dan pertikaian yang tidak henti-hentinya telah menghilangkan azas dasar untuk tercapainya suatu penyatuan ialah saling mempercayai pihak yang lain. Bukti akan tiadanya saling percaya ini ialah kegiatan-kegiatan subversif dan sabotase Utara yang tidak pernah terhenti sementara dialog-dialog damai sedang berlangsung.

Dalam Pernyataan Bersama tanggal 4 Juli 1972 dicantumkan bahwa campur tangan pihak asing dalam usaha penyatuan tidak dibenarkan. Diterapkan pada situasi di Korea, Korea Utara menganggap kehadiran UNCURK (Komisi PBB untuk Penyatuan dan Rehabilitasi Korea) dan UNC (Komisi PBB) sebagai unsur asing yang ikut

campur; sedangkan bagi Selatan unsur PBB tersebut tidak dianggap sebagai unsur asing dan yang kehadirannya justru dikehendaki oleh Selatan. Utara menghendaki ditarik mundurnya pasukan Amerika Serikat dari wilayah Korea Selatan, yang sebaliknya masih menganggap perlu kehadirannya hingga selesainya modernisasi angkatan bersenjata.

Hambatan-hambatan yang ada dalam usaha reunifikasi Korea pada umumnya terdapat pada bangsa dan negara itu sendiri dalam arti bahwa unsur-unsur luar tidak ikut berperanan sepanjang unsur-unsur luar itu tidak secara sengaja melibatkan diri dalam masalah Korea ini. Hal ini disebabkan karena kedua superpowers Amerika Serikat dan Uni Sovyet, demikian juga kedua negara besar Asia, RRC dan Jepang tidak mempunyai alasan untuk melibatkan dirinya. Tetapi jelas bahwa perkembangan ini diikuti dengan seksama oleh negara-negara tersebut.

Kebijaksanaan politik luar negeri baru Korea Selatan

Sejak diproklamirkannya Republik Korea pada tahun 1948, PBB hanya mengakui pemerintah ini sebagai satu-satunya pemerintah Korea yang sah. Pemerintah Korea Utara yang diproklamirkan sebulan sesudah Korea Selatan tidak diakui oleh PBB tetapi menerima pengakuan dari negara-negara sosialis dan komunis. Dalam perjalanan waktu selama duapuluh lima tahun, Korea Selatan telah mendapatkan pengakuan dari kuranglebih 80 negara dibandingkan dengan Korea Utara hanya 40 negara. Korea Selatan karena pengakuan PBB diperkenankan menjadi anggota berbagai organisasi internasional yang bernaung di bawah PBB, sedangkan Korea Utara tidak mempunyai hak ini.

Tetapi akhir-akhir ini tampak ada kecenderungan baru di antara beberapa negara dalam menentukan sikap terhadap masalah Korea. Kecenderungan ini ialah prinsip 'dua Korea' yang dianggap sebagai salah satu jalan untuk menyelesaikan masalah Korea. Negara-negara yang semula hanya mengakui Korea Selatan mulai memberikan pengakuan juga kepada Korea Utara, dan beberapa bahkan telah mengadakan hubungan diplomatik. Di pihak Korea Utara sendiri, terdapat perubahan sikap dan mulai membuka kemungkinan untuk berhubungan dengan negara-negara non-komunis. Pada tahun 1973 ini Korea Utara telah diterima sebagai anggota WHO, yang berarti menjamin Korea Utara untuk mendapatkan status peninjau dalam PBB.

Kenyataan ini telah memaksa Korea Selatan untuk meninjau kembali politik luar negerinya dan yang kemudian diumumkan lewat pidato Presiden Park Chung-hee tanggal 23 Juni 1973.

Pokok-pokok isi pidato tanggal 23 Juni 1973 yang berjudul "The Special Statement Regarding Foreign Policy for Peace and Unification" adalah:

1. Unifikasi Korea secara damai merupakan tugas suci seluruh rakyat Korea.
2. Perdamaian harus dipertahankan di Korea dengan segala cara. Korea Utara dan Selatan tidak akan saling mengadakan intervensi terhadap masing-masing pihak.
3. Korea Selatan bertekad untuk mengamankan hasil-hasil dialog Utara-Selatan yang dijiwai oleh Pernyataan Bersama tanggal 4 Juli 1972.
4. Korea Selatan tidak menentang keanggotaan Korea Utara dalam badan-badan internasional sepanjang bertujuan untuk mengurangi ketegangan-ketegangan dan memperkokoh kerjasama internasional.
5. Korea Selatan tidak berkeberatan bersama-sama Korea Utara memasuki PBB jika dikehendaki oleh sebagian besar negara-negara anggota dan sepanjang tidak mengganggu usaha-usaha ke arah tercapainya unifikasi Korea.
6. Korea Selatan akan menjalankan politik luar negeri yang terbuka bagi semua bangsa di dunia atas dasar azas resiprositas dan persamaan.
7. Perdamaian dan bertetangga baik merupakan basis yang kokoh bagi politik luar negeri Korea Selatan.

Persetujuan Korea Selatan untuk memasuki PBB bersama dengan Korea Utara ternyata tidak disetujui oleh pihak Korea Utara. Dalam tanggapannya terhadap kebijaksanaan Korea Selatan, Presiden Kim Il-sung menyatakan bahwa hendaknya kedua Korea membentuk suatu konfederasi dan memasuki PBB di bawah satu panji yaitu Republik Konfederasi Koryo. Tetapi PM Korea Selatan, Kim Jong-phill, menyatakan bahwa kebijaksanaan Korea Utara tidak realistis dan tidak dapat diterima. PM Kim menyatakan bahwa 'Di Jerman ada satu bangsa, dua buah negara dan dua buah pemerintahan, tetapi di Korea hanya ada satu bangsa, satu negara dan dua pemerintahan'.

Kesimpulan

Dari kenyataan yang berkembang selama tiga tahun terakhir sejak dicetuskannya usul penyatuan kembali Korea, berbagai usaha telah dicoba untuk merealisasikan cita-cita bangsa Korea itu. Berbagai pengalaman dan masalah yang dihadapi selama usaha-usaha itu dilangsungkan telah menunjukkan bahwa gagasan unifikasi telah disepakati oleh kedua belah pihak yang terbagi. Hanya adanya berbagai perbedaan dan hambatan telah membuka kesadaran dan kenyataan baru bahwa cita-cita itu baru akan tercapai dalam waktu yang cukup lama.

Masalah unifikasi Korea adalah masalah nasional bangsa itu sendiri dan di tangan mereka sendiri pula nasib selanjutnya negara itu akan ditentukan. Tetapi yang patut diperhatikan oleh dunia adalah kenyataan bahwa penyatuan kembali Korea berarti bergabungnya dua elemen yang masing-masing telah mempunyai prasarana industri yang ampuh. Sementara Korea Selatan sedang menjalani transisi struktural dari ekonominya ke arah industri berat, dan dengan Korea Utara secara lambat tapi pasti akan mengimpor teknologi, Korea yang bersatu di waktu yang akan datang akan menjadi satu kekuatan ekonomi baru dengan segala kelanjutannya.